

POVERTY

KKB  
KK  
FIS. AN 28/04  
PUT  
P

# PERANAN PEMERINTAH KOTA DALAM PEMBERDAYAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI PERKOTAAN

(STUDI DESKRIPTIF KUALITATIF TENTANG PERANAN DINAS SOSIAL  
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN  
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA SURABAYA)

## SKRIPSI



OLEH :

PIPIT PITASARI

NIM : 079715432

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A

Semester Genap Tahun 2003/2004

B C

**PERANAN PEMERINTAH KOTA DALAM PEMBERDAYAAN  
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI PERKOTAAN**

**(STUDI DESKRIPTIF KUALITATIF TENTANG PERANAN DINAS SOSIAL  
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN  
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA SURABAYA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas Dan  
Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**OLEH :**

**PIPIT PITASARI**

**NIM : 079715432**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A**

**Semester Genap Tahun 2003/2004**

## LEMBAR PENGESAHAN

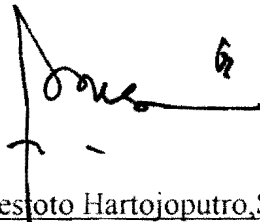
Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi Ilmu  
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Airlangga pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 30 Maret 2004

Pukul : 08.00-09.00 WIB

Ketua:



Drs. Roesoto Hartojoputro, SU

NIP: 130783545

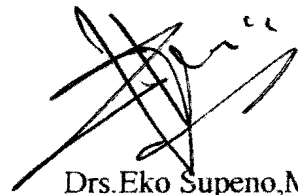
Anggota:



Drs. Didid Supojo, Msi

NIP : 131289507

Anggota:



Drs. Eko Supeno, Msi

NIP : 131871469

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan .

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eko Supeno', with a stylized flourish at the end.

Drs. Eko Supeno, M Si

NIP 131871469

## ABSTRAKSI

Gelandangan dan Pengemis juga merupakan warga masyarakat yang berhak untuk hidup layak begitu juga keberadaan mereka di kota Surabaya ini. Pemerintah Kota selaku Penyelenggara negara juga turut bertanggung jawab dalam kesejahteraan gelandangan dan pengemis. Dalam hal ini instansi pemerintah kota yang terkait langsung dengan gelandangan dan pengemis adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya.

Dari uraian diatas sesuai dengan bidang Ilmu Administrasi Negara, penulis tertarik untuk menelitinya, yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peranan pemerintah kota (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan) Kota Surabaya dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan gelandangan dan pengemis serta faktor-faktor yang menjadi kendala dan pendukung dalam implementasi kebijakan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran mengenai bagaimana peranan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis, dimana tidak menggunakan sampel secara acak tetapi menggunakan sampel bertujuan (purposive sampel). Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kabid Sub Dinas Resos, Bapak Ariyanto; Ka Seksi Resos Penyandang Cacat dan Tuna Sosial, Bapak Sudjatmoko; Ibu Sudjiati selaku Pengurus dari Pondok Tuna Sosial di Keputih; serta Ibu Parmi selaku informan dari kelompok sasaran yaitu gelandangan dan pengemis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: wawancara, menggunakan data sekunder dan observasi di lapangan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa peranan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis adalah sebagai mediator, fasilitator, dan yang mendanai seluruh proses pelaksanaan kebijakan. Yang menjadi faktor kendala dalam pelaksanaan kebijakan adalah: rendahnya motivasi dan disiplin pegawai, tidak tersedianya panti rehabilitasi sosial yang representatif, belum tersedianya peraturan perundang-undangan, belum tersedianya data dan lemahnya aspek koordinasi. Faktor yang menjadi pendukung adalah tersedianya dukungan dana, keberadaan gedung dan sarana kantor, dan jumlah pegawai yang mempunyai pengalaman yang memadai.